

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM  
PERENCANAAN PENETAPAN LIMA NAGARI KABUPATEN  
AGAM MENJADI NAGARI ADAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**Dr. Tengku Rika Valentina, MA**

**Drs. Tamrin, M.Si**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2022**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai analisis peran *stakeholders* dalam perencanaan penetapan lima nagari di Kabupaten Agam untuk dijadikan sebagai nagari adat. Perencanaan penetapan nagari adat ini dilakukan berdasarkan keinginan bersama masyarakat Minangkabau untuk mengembalikan nagari kepada bentuk yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai adat serta budaya asli dalam masyarakat nagari. Berdasarkan keinginan ini maka dibentuklah Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang nagari yang menjadi payung hukum untuk pelaksanaan penetapan nagari adat di Sumatera Barat. Kabupaten Agam menjadi salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang mengusulkan lima nagari dari wilayahnya untuk dijadikan nagari adat. Namun pelaksanaannya hingga sekarang belum dapat terlaksana dikarenakan terdapat beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Untuk mengetahui penyebab lambatnya perwujudan nagari adat di Kabupaten Agam dilakukan dengan menganalisis peran para *stakeholders* yang terlibat yaitu DPRD Kabupaten Agam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Barat, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam dan Pemerintahan Lima Nagari di Kabupaten Agam. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasanya terdapat peran yang belum dijalankan *stakeholders* dalam mempercepat perwujudan nagari adat ini. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teori analisis *stakeholders* oleh Reed yang melakukan identifikasi, klasifikasi dan penyelidikan terhadap hubungan *stakeholders*. Proses penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan penetapan nagari adat di Kabupaten Agam mengalami keterhambatan dikarenakan para pemangku kebijakan tidak menjalankan perannya dalam mendukung percepatan tercapainya perwujudan nagari adat.

**Kata Kunci:** Peran, Nagari Adat, *Stakeholders*.



## ABSTRACT

This research discusses about the analysis of the role of stakeholders in planning the determination of five nagari in Agam Regency to serve as customary villages. The planning for the determination of the adat nagari is carried out based on the shared desire of the Minangkabau community to return the nagari to a form that reflects local wisdom and traditional values and indigenous culture in the nagari community. Based on this desire, the Regional Regulation of the Province of West Sumatra No. 7 of 2018 concerning Nagari was formed which became the legal umbrella for the implementation of the determination of the customary nagari in West Sumatra. Agam Regency is one of the regencies in West Sumatra that proposes five nagari from its territory to be made into adat villages. However, the implementation has not been carried out until now because there are several things that cause it. To find out the cause of the slow realization of the adat nagari in Agam Regency, it was carried out by analyzing the roles of the stakeholders involved, namely the Agam Regency DPRD, the West Sumatra Village and Community Empowerment Service, the Agam Regency Community and Nagari Empowerment Service and the Five Nagari Government in Agam Regency. This research shows the results that there are roles that have not been carried out by *stakeholders* in accelerating the realization of this customary village. And then this research was analyzed using stakeholder analysis theory by Reed which identified, classified and investigated stakeholder relationships. The research process is carried out using qualitative research methods and using case study methods. The results of this study indicate that the planning for the determination of the customary Nagari in Agam Regency is experiencing obstacles because the policy makers do not carry out their role in supporting the acceleration of achieving the realization of the adat nagari.

**Keywords:** Role, Nagari Adat, *Stakeholders*.

